

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2002). Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Deepublish.
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. 277–289.
- Manguma, V. V. E. (2021). Strategi Generasi Millennial Bertahan Hidup Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Emik*, 4(1), 84–97.
- Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 7(2), 143–162.
- Naufal, M. H. (2021). Dampak Pandemi di Pati, Banyak Orang Buka Usaha, Ada 2 Ribu UMKM Baru pada Dua Tahun Terakhir—*Tribunjateng.com*. *Tribun Jateng*. <https://jateng.tribunnews.com/2021/09/08/dampak->

pandemi-di-pati-banyak-orang-buka-usaha-baru-ada-14-ribu-umkm-baru-pada-dua-tahun-terakhir

- Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputersasi Akuntansi*, 12(1), 20–37.
- Saprianoor, S. (2021). Peluang Usaha Masyarakat Di Kasongan Kabupaten Katingan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Daun Lontar: Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa*, 7(1), 130–139.
- Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 106–116.